



MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
 DPRD KOTA YOGYAKARTA

Peran Strategis, Legislatif Usulkan Regulasi Pengelolaan Kebudayaan



YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogyakarta memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan daya saing daerah. Sering predikat Kota Yogyakarta sebagai pusat budaya dan pendidikan nasional, kalangan legislatif pun mengusulkan regulasi terkait pengelolaan kebudayaan. Regulasi itu kelak diharapkan mampu menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola kebudayaan agar memberikan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapempera) DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandani mengungkapkan kebudayaan adalah dasar fundametal yang memandu dan membentuk arah kemajuan. Hal ini karena kebudayaan menyediakan nilai-nilai, identitas, dan tatanan sosial yang mendorong pembangunan berkelanjutan, ketahanan, inovasi, serta mem-



Ketua Bapempera DPRD Kota Yogyakarta (kiri) menyampaikan penjelasan terkait Raperda Pengelolaan Kebudayaan.



Ketua Bapempera DPRD Kota Yogyakarta menyerahkan dokumen draf Raperda Pengelolaan Kebudayaan.

perkuat karakter dalam pembangunan kota "Kota Yogyakarta berada dalam posisi strategis untuk mengambil peran utama dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya. Keberadaan Kraton Yogyakarta, kawasan sumbu filosofis, kawasan cagar budaya, serta berbagai kekayaan tradisi seni budaya membenarkan keunggulan kompetitif yang meningkatkan daya saing kota," paparnya.

Dalam rencana pembangu-

gunaan jangka menengah daerah (RPJMD), secara tegas dituangkan jika kebudayaan menjadi dasar pembangunan. Ini juga tidak lepas dari karakteristik Kota Yogyakarta di mana lebih dari 45 persen wilayahnya merupakan kawasan yang terkait dengan cagar budaya dan pelestarian lingkungan. Sehingga pengelolaan ruang yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kapasitas daya dukung kawasan-kawasan tersebut agar pembangu-

struktur tidak justru merusak nilai sejarah dan budaya yang menjadi karakteristik Kota Yogyakarta.

"Hal ini semakin penting mengingat penetapan sumbu filosofis sebagai world heritage oleh UNESCO pada tahun 2023 yang menuntut pembangunan perkotaan secara lebih leluasa dan hati-hati," imbuh politisi PDI Perjuangan ini.

Ipung pun menggaris bawahi bahwa sebagai kota yang tumbuh dengan iden-

titas kultural yang kental, Kota Yogyakarta sudah seharusnya menyadari jika sumber daya budaya dan wansan budaya yang dimiliki berpotensi menjadi modal pembangunan. Sehingga kebudayaan Kota Yogyakarta perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina dalam pengelolaan kebudayaan daerah.

"Maka dari itu kami memandang perlu dipayungi oleh peraturan daerah (perda) sebagai salah satu dasar kepastian hukum daerah

dalam pengelolaan kebudayaan," tandasnya.

Usulan tersebut juga sudah disampaikan melalui sidang atau rapat paripurna dan berhasil dibentuk tim panitia khusus (pansus) yang akan melakukan pembahasan secara komprehensif. Ditunjuk sebagai Ketua Pansus ialah Munazzar dan Fraksi Partai Golkar dan Wakil Ketua Pansus Tri Waluko Widodo dari Fraksi PAN. Total ada 11 anggota DPRD Kota Yogyakarta

yang menjadi tim membahas Raperda Pengelolaan Kebudayaan tersebut.

Sebagai pihak yang mengusulkan regulasi itu, Ipung menjabarkan tujuan Raperda Pengelolaan Kebudayaan antara lain untuk mengukuhkan karakter dan jati diri masyarakat melalui akses kebudayaan. Kemudian juga memelihara nilai-nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga dan pemerintahan daerah. Selain itu melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah, meningkatkan ketahanan kebudayaan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Arah pengaturan raperda ini adalah untuk menciptakan kebijakan yang komprehensif dan strategis dalam tata kelola pengelolaan kebudayaan," tandasnya.

Di samping itu, dalam fatiran teknis pembagian dan pemberian kewenangan masing-masing OPD bisa dilakukan secara jelas dan rinci. Ini tentu untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan penyelenggaraan pengelolaan kebudayaan di Kota Yogyakarta selaras dengan regulasi di atasnya. (DHI)



Peserta sidang paripurna DPRD Kota Yogyakarta menyimak penjelasan terkait Raperda Pengelolaan Kebudayaan.



KR-Ardhi Wahdan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kebudayaan			
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005